

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ambon, Februari 2021
Kepala Subbag Pengelola Keuangan dan
BMN

M.IKBAL TAHALUA., SH., M.Si
NIP.197708102003121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH MALUKU
Jalan Sultan Babullah Nomor 17-18 Ambon 97115
Telepon.(0911) 352803 Faximile 352807

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, Februari 2021
Kepala Subbag Pengelola
Keuangan dan BMN

M.IKBAL TAHALUA, SH., M.Si
NIP.197708102003121001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.178,220,269 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp.12,096,322,096 atau mencapai 96.51 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.12,534,202,000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020 Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp.47,777,558,628 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.53,824,602; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.96,229,466; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.47,627,504,560; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.52,050,925 dan Rp.47,725,507,703

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.23,850,227 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.13,803,750,466 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(13,779,900,239) Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.4,628,160,900 dan sebesar Rp.(0) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(18,408,061,139)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp.54,322,870,549 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(18,408,061,139) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.323,316,001 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.12,134,014,294 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp.47,725,507,703

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH MALUKU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2020		% thd Angg	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	178.220.269	#DIV/0!	22.771.133
JUMLAH PENDAPATAN		-	178.220.269	#DIV/0!	22.771.133
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	8.405.196.000	8.180.568.519	97,33	8.025.810.768
Belanja Barang	B.4	4.127.831.000	3.914.603.577	94,83	3.291.385.134
Belanja Modal	B.5	1.175.000	1.150.000	97,87	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	#DIV/0!	
JUMLAH BELANJA		12.534.202.000	12.096.322.096	96,51	11.317.195.902

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR WILAYAH MALUKU
NERACA
PER 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	39.019.700	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	(195.098)	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	682.050.118
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	15.000.000	4.004.000
Jumlah Aset Lancar		53.824.602	686.054.118
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	96.713.032	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	(483.566)	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		96.229.466	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	42.486.357.000	43.005.103.000
Peralatan dan Mesin	C.15	6.265.811.684	8.225.551.239
Gedung dan Bangunan	C.16	5.303.038.000	13.036.113.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	331.320.267	331.320.267
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(6.759.022.391)	(10.958.923.559)
Jumlah Aset Tetap		47.627.504.560	53.639.163.947
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.21	96.713.032	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.22	(483.566)	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		96.229.466	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.23	-	-
Aset Lain-Lain	C.24	2.044.395.555	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	(2.044.395.555)	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		47.777.558.628	54.325.218.065
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.26	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	52.050.925	2.347.516
Pendapatan Diterima di Muka	C.28	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.29	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		52.050.925	2.347.516
JUMLAH KEWAJIBAN		52.050.925	2.347.516
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	47.725.507.703	54.322.870.549
JUMLAH EKUITAS		47.725.507.703	54.322.870.549
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		47.777.558.628	54.325.218.065

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH MALUKU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	23.850.227	22.769.908
JUMLAH PENDAPATAN		23.850.227	22.769.908
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	8.230.271.928	8.028.158.284
Beban Persediaan	D.3	114.404.500	110.448.350
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.662.559.465	2.267.917.040
Beban Pemeliharaan	D.5	519.810.241	637.253.797
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.158.135.689	936.981.339
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.118.603.544	1.573.689.363
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(34.901)	-
JUMLAH BEBAN		13.803.750.466	13.554.448.173
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(13.779.900.239)	(13.531.678.265)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		105.000.000	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		4.775.723.842	-
SURPLUS /DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		(4.670.723.842)	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya		42.652.942	356.225
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		90.000	420.000
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		42.562.942	(63.775)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(18.408.061.139)	(13.531.742.040)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(18.408.061.139)	(13.531.742.040)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH MALUKU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	54.322.870.549	59.573.395.770
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(18.408.061.139)	(13.531.742.040)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(323.316.001)	(3.095.316.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	(574.648.200)	(1.849.029.372)
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	251.322.199	(1.246.286.628)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	10.000	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		12.134.014.294	11.376.532.819
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	(6.597.362.846)	(5.250.525.221)
EKUITAS AKHIR	E.5	47.725.507.703	54.322.870.549

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Maluku

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Mempunyai Tugas dan Fungsi dalam Melakukan Koordinasi Dibidang Bimbingan dan Dukungan Implementasi Akuntansi Pemerintah dengan cakupan wilayah Provinsi Maluku. Melalui peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku berkomitmen dengan visi dan misi:

“Masyarakat memperoleh kepastian hokum, melindungi hak asasi manusia”

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi Keuangan yang dihasilkan oleh system akuntansi berbasis akrual yang diimplemetasikan.

3. Mengembangkan system informasi yang andal dan terpecaya.

Menyelenggarakan system dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM Maluku menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan

basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Maluku. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau

dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah Melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan Terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilain dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan

penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan Organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa penggunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak

berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset

e. Aset Lainnya

Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak	50

Ekonomi Produser Fonogram.	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan

Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan

Rp.128,850,277

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.128,850,277 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan	-	105.000.000	#DIV/0!
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	-	23.850.227	#DIV/0!
Pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara	-	49.000.000	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	-	370.042	#DIV/0!
Jumlah	#REF!	178.220.269	#REF!

- *Realisasi Pendapatan Sebesar Rp.105,000,000 adalah Pendapatan dari Penjualan Gedung dan Bangunan Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku.*
- *Realisasi Pendapatan Sebesar Rp.49,000,000 adalah Pendapatan Penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pihak Lain/Pihak Ketiga (a.n Adjid Taha dan Ronald Tuasun)*
- *Realisasi Pendapatan Sebesar Rp.23,850,227 adalah Pendapat dan sewa rumah Dinas Pegawai.*
- *Realisasi Pendapatan Sebesar Rp.370,042 adalah Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang lalu*

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2020 mengalami kenaikan 0.00 persen dibandingkan TA 2019. Selain itu, Pendapatan Lain-lain Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. mengalami

kenaikan sebesar 0.00 persen

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan	Rp 105.000.000	-	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	23.850.227	22.769.908	4,74
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	49.000.000	-	
Pendapatan Lain-lain	370.042	1.225	30107,51
Jumlah	178.220.269	22.771.133	682,66

Realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp.178,220,269 adalah

1. Realisasi Pendapatan Sebesar Rp.105,000,000 adalah Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku.
2. Realisasi Pendapatan Sebesar Rp.49,000,000 adalah Pendapatan Penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pihak Lain/Pihak Ketiga (a.n Adjid Taha dan Ronald Tuasun)
3. Realisasi Pendapatan Sebesar Rp.10,604,963 adalah Pendapat dan sewa rumah Dinas Pegawai.
4. Realisasi Pendapatan Sebesar Rp.370,042 adalah Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang lalu

sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp.22,771,133 adalah penerimaan kembali belanja pegawai tahun yang lalu

1. Realisasi Pendapatan Sebesar Rp.22,769,908 adalah Pendapat dan sewa rumah Dinas Pegawai.
2. Realisasi Pendapatan Sebesar Rp.1,225 adalah Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang lalu

Realisasi Belanja B.2 Belanja

**Negara
Rp.12,096,322,096**

Realisasi Belanja instansi pada TA 2020 adalah sebesar Rp.12,096,322,096 atau 50% dari anggaran belanja sebesar Rp.12,534,202,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	8.405.196.000	8.180.568.519	97,33
Belanja Barang	4.127.831.000	3.914.603.577	94,83
Belanja Modal	1.175.000	1.150.000	97,87
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Total Belanja Kotor	12.534.202.000	12.096.322.096	96,51
Pengembalian		-	-
Jumlah	12.534.202.000	12.096.322.096	96,51

- Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2020 adalah Rp.12,096,322,096 atau 96,51% dari Belanja pegawai karna adanya kenaikan pangkat dan Belanja Barang dari Perjalanan dinas, honorarium dan lainnya.

Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 6,88% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain :

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	8.180.568.519	8.025.810.768	1,93
Belanja Barang	3.914.603.577	3.291.385.134	18,93
Belanja Modal	1.150.000	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Jumlah	12.096.322.096	11.317.195.902	6,88

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp.8,180,568,519

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.8,180,568,519 dan Rp.8,025,810,768 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2020 mengalami Kenaikan sebesar 1,93 persen dibandingkan dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara

lain oleh:

1. Adanya Mutasi pegawai dari Kanwil ke Satker
2. Kenaikan Pangkat Pegawai dan pembayaran kekurangan kenaikan pangkat pegawai dan tunjangan.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.177.705.450	7.068.014.379	1,55
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	#DIV/0!
Belanja Honorarium	0	0	#DIV/0!
Belanja Lembur	34.405.000	27.117.000	26,88
Belanja Uang Makan PNS	968.459.000	931.243.000	4,00
Jumlah Belanja Kotor	8.180.569.450	8.026.374.379	1,92
Pengembalian Belanja Pegawai	(931)	(563.611)	(100)
Jumlah Belanja	8.180.568.519	8.025.810.768	1,93

Belanja Barang
Rp.3,914,603,577

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.3,914,603,577 dan Rp.3,291,385,134 Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan 18,93% dari Realisasi Belanja Barang TA 2019.

Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.142.425.911	1.077.921.463	5,98
Belanja Barang Non Operasional	217.236.700	137.223.216	58,31
Belanja Jasa	620.846.736	388.972.969	59,61
Belanja Pemeliharaan	510.905.541	640.435.497	(20,23)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.158.135.689	937.471.339	23,54
Belanja Persediaan	265.053.000	110.230.650	140,45
Jumlah Belanja Kotor	3.914.603.577	3.292.255.134	18,90
Pengembalian Belanja	-	(870.000)	
Jumlah Belanja	3.914.603.577	3.291.385.134	18,93

- Realisasi Belanja Barang TA 2020 lebih besar dari TA 2019 hal ini antara lain disebabkan karena belanja barang, belanja Pemeliharaan, belanja barang persediaan dan Belanja Jasa untuk penanganan pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020.

Belanja Modal

B.5 Belanja Modal

Rp.1,150,000

Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1,150,000 dan Rp.0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019

- *Realisasi Belanja Modal TA 2020 lebih besar dari TA 2019 antara lain adalah pembelian belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi COVID-19 Sebesar Rp.1,150,000*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Realisasi tersebut pada TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 0.00 persen dibandingkan TA 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.1,150,000

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 adalah sebesar Rp.1,150,000, mengalami kenaikan sebesar 0.00 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp.0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Penanganan pandemi COVID-19	1.150.000	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	1.150.000	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1.150.000	0	#DIV/0!

- Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1,150,000 adalah Thermogun .

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2020 Rp.0. dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 0.00 persen dibandingkan Realisasi TA 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A 2019	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan penambahan jaringan teknologi informasi dalam rangka mendukung rencana strategis.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 0.00 persen dibandingkan Realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan pengadaan *software* untuk mendukung implementasi akuntansi pendapatan berbasis akrual.

Belanja Bantuan Sosial Rp.0.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Kelompok Pendidikan Jaya Maju	0	0	#DIV/0!
Kelompok Pendidikan Cenderawasih	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal

neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2020 dan 2019

Keterangan	TH 2020	TH 2019
Uang Tunai	-	-
Bank Mandiri KC Ambon Pattimura	-	-
Jumlah	-	-

- Saldo Kas pada Uang Tunai dan Bank di rekening bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Rp.0, dan Rp.0,.

Kas di Bendahara Penerimaan Rp.0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2020 dan 2019

Keterangan	TH 2020	TH 2019
Uang Tunai	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.0.

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal

pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2020 dan 2019

Keterangan	TH 2020	TH 2019
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNBP **4 Piutang PNBP**

Rp.0.

Saldo Piutang PNBP per tanggal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2020 dan 2019

Uraian	TH 2020	TH 2019
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan **5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

TP/TGR
Rp.39,019,700

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.39,019,700. dan Rp.0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2020 dan 2019

No	Nama	TH 2020	TH 2019
1	Pak Adjid Taha	39.019.700	-
Jumlah		39.019.700	-

Bagian Lancar **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

TPA

Rp.0.

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2020 dan 2019

No	Nama	TH 2019	TH 2018
1	-	-	-
2	-	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih –

Piutang Lancar

Rp.(195,098)

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.(195,098) dan Rp.0 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut;

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar TA 2020 dan 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	(195.098)	0,50%	(975)
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	(195.098)		(975)
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	(195.098)		(975)

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp.0.*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka Tahun Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0., dan Rp.682,050,118 Belanja dibayar di muka merupakan Kewajiban yang sudah terbayar pada tahun anggaran berjalan sebagai akibat dari belanja jasa sewa gedung dan bangunan kantor selama 24 bulan terhitung mulai bulan November 2018 untuk periode sampai dengan Oktober 2020 yang di bayarkan di tahun 2018 . Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2020 dan 2019

Jenis	TH 2020	TH 2019
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	682.050.118
Jumlah	-	682.050.118

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima Rp.0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima TA 2020 dan 2019*

Jenis	TH 2019	TH 2018
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan
Rp.15,000,000

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.15,000,000 dan Rp.4,004,000 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2020 dan 2019

Jenis	TH 2020	TH 2019
Barang Konsumsi	15.000.000	4.004.000
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	15.000.000	4.004.000

- Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp.96,713,032

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp.96,713,032. dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2020 dan 2019

No	Debitur	TH 2020	TH 2019
1	Ronald Tuasun	96.713.032	-
2	-	-	-
Jumlah		96.713.032	-

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp.0.*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2020 dan 2019

No	Debitur	TH 2019	TH 2018
1		-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp.(483,566)*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.(483,566) dan Rp.(0). Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			

Jangka Panjang TA 2019

C.14 Tanah

Tanah
Rp.42,486,357,00
0

Tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku per per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.42,486,357,000 dan Rp.43,005,103,000 Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	43.005.103.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Selisih revaluasi aset	
Hibah	-
Reklasifikasi	
Mutasi kurang:	
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yang tidak ditemukan	(518.746.000)
Saldo Per 31 Desember 2020	42.486.357.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	
Nilai Buku per 31 Desember 2020	42.486.357.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2020

No	Luas	Lokasi
1	850 m2	Jl. Sultan Babullah No 17-18 Ambon
2	5,000 m2	Jl. Ir.M.Putuhena Poka Ambon
3	30,000 m2	Tiakur Kabupaten MBD
4	30,000 m2	Sifanan Kec. Tanimbar Selatan Kab. MTB
5	1,325 m2	Jl. Petra Karpan
6	3000 m2	Jl. Karel Satsuitubun Passo
7	600 m2	Jl. Dr. Malaiholo Air Salobar
8	10000 m2	Jl. Karel Satsuitubun Passo
9	200 m2	Jl.Pintu Ina Karpan
10	1146 m2	Jl. Pintu Ina Karpan
11	400 m2	Jl. Dr. Malaiholo Air Salobar
12	168 m2	Gadihu
13	168 m2	Gadihu
14	168 m2	Gadihu

*Peralatan dan
Mesin
Rp.,6,265,811,68
4*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan Per 31 Desember 2019 adalah Rp.6,265,811,684 dan Rp.8,225,551,239 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	8.225.551.239
Mutasi tambah:	-
Pembelian	1.150.000
Transfer Masuk	204.844.000
Reklasifikasi Masuk	2.217.618
Mutasi kurang:	-
Reklasifikasi Keluar	2.217.618
Transfer keluar	0
Koreksi Pencatatan Nilai / Kuantitas	121.338.000
Penghentian dari penggunaan	(2.044.395.555)
Saldo per 31 Desember 2020	6.265.811.684
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-5.629.583.679
Nilai Buku per 31 Desember 2020	636.228.005

- Transfer Masuk Pada Kanwil Kemenkumham Maluku TA 2020 sebesar Rp.204,844,000 berasal dari Sekretariat Jenderal Berupa Peralatan dan Mesin di antaranya sebagai berikut;
 1. Kamera Conference Rp.25,334,000
 2. Digital Thermometer Rp.179,500,000
- Pembelian nominal sebesar Rp.1,150,000

*Gedung dan
Bangunan
Rp.5,303,038,000*

C.16 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan Per 31 Desember 2019 adalah Rp.5,303,038,000 dan Rp.13,036,113,000. Mutasi transaksi terhadap Gedung

dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	13.036.113.000
Mutasi tambah:	
Koreksi Semua Hasil Penilaian kembali	5.269.200
Koreksi Kesalahan input IP	202.047.000
Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali	174.394.000
Mutasi kurang:	
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yang tidak ditemukan	(257.949.200)
Penghentian Aset dari penggunaan	(7.856.836.000)
Saldo per 31 Desember 2020	5.303.038.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(1.129.438.712)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	4.173.599.288

Jalan, Jaringan dan Irigasi
Rp.0.

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan Per 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0.dan Rp.0.dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-

Aset Tetap Lainnya
Rp.331.320.267
7

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah Rp.331.320.267 dan Rp.331.320.267 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	304.355.887
Mutasi tambah:	0
Transfer Masuk	26.964.380
Penghentian Aset dari Penggunaan	0
Saldo per 31 Desember 2020	331.320.267
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0
Nilai Buku per 31 Desember 2020	331.320.267

- Aset tetap lainnya berupa buku untuk perpustakaan transfer masuk dari DIPA BPHN tahun 2019.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp.0.*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp.(6,759,022,391)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp(6,759,022,391) dan Rp.(10,958,923,559) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2020 dan 2019

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	7.151.960.590	5.629.583.679	1.522.376.911
2	Gedung dan Bangunan	3.806.962.969	1.129.438.712	2.677.524.257
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		10.958.923.559	6.759.022.391	4.199.901.168

*Aset Tak
Berwujud Rp.0.*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 2019 Rp.0. dan Rp.0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat

diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2020	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	-

Aset Lain-Lain
Rp.2,044,395,5
55

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.2,044,395,555,. dan Rp.0,. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	9.901.231.555
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	(7.856.836.000)
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2020	2.044.395.555
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	2.044.395.555

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp.(2,044,395,5
55)

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp.(2,044,395,555) dan Rp.(0). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0		
Software	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	2.044.395.555	2.044.395.555	0
Jumlah	2.044.395.555	2.044.395.555	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN Rp.0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp.52,050,925

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.52,050,925 dan Rp.2,347,516 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai	6.686.929	Kekurangan Kenaikan Pangkat a.n Boedi Prayitno
Belanja Pegawai	45.364.000	Sisa Uang Makan Pegawai Bulan Desember 2020
Total	52.050.929	

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp.0.*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp.0.*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp.0. dan Rp.0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
TA 2020 dan 2019*

Uraian	TH 2020	TH 2019
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

*Ekuitas
Rp.47,725,507,703*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.47,725,507,703 dan Rp.54,322,870,549. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan
PNBP
Rp.23,850,227*

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.23,850,227 dan Rp.22,769,908. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	23.850.227	22.769.908	5
Jumlah	23.850.227	22.769.908	5

*Beban Pegawai
Rp.8,230,271,928*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.8,230,271,928 dan Rp.8,028,158,284. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	5.649.132.982	5.534.200.878	2
Beban Tunjangan-tunjangan	1.532.823.337	1.535.515.188	-0
Beban Uang Makan PNS	1.013.823.000	931.243.000	9
Beban Lembur	34.405.000	27.117.000	27
Jumlah	8.230.184.319	8.028.076.066	3

*Beban Persediaan
Rp.114,404,50*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar

0

Rp.114,404,500 dan Rp.110,448,350. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	114.404.500	109.343.350	5
Beban Persediaan pita cukai, materai dan legas	-	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	-	1.105.000	-100
Jumlah	114.404.500	110.448.350	4

*Beban Barang dan Jasa
Rp.2,662,559,465*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.2,262559,465 dan Rp.2,267,917,040 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	739.330.011	689.633.250	7,21
Beban Penambahan Daya Tahan Tubuh	3.286.800	0	#DIV/0!
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	3.056.000	19.052.900	
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	197.514.000	188.250.000	4,92
Beban Barang Operasional Lainnya	187.931.500	180.985.313	
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	11.307.600		
Beban Bahan	124.621.700	92.923.216	34,11
Beban Honor Output Kegiatan	42.300.000	43.920.000	(3,69)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	49.515.000	0	#DIV/0!
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	800.000		
Beban Langganan Listrik	87.273.042	171.080.637	(48,99)
Beban Langganan Telepon	0	0	#DIV/0!
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	#DIV/0!
Beban Sewa	952.895.118	823.450.202	16
Beban Jasa Profesi	47.050.000	25.800.000	82,36
Beban Jasa Lainnya	31.678.694	32.821.522	(3,48)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	184.000.000		
Jumlah	2.662.559.465	2.267.917.040	17,40

*Beban
Pemeliharaan
Rp.519,810,24
1*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.519,810,241 dan Rp.637,253,797. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.000.000	194.000.000	(93,81)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	473.905.641	426.237.797	11,18
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	33.904.600	17.016.000	99,25
Jumlah	519.810.241	637.253.797	(18,43)

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.1,158,135,
689*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1,158,135,689 dan Rp.936,981,339. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	699.089.689	667.796.339	4,69
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	82.500.000	21.680.000	280,54
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	376.546.000	247.505.000	52,14
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	#DIV/0!
Jumlah	1.158.135.689	936.981.339	23,60

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban Bantuan Sosial Rp.0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.1,118,603,544

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1,118,603,544 dan Rp.1,573,689,363. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2020 dan 2019

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	643.356.644	913.615.580	(29,58)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	321.191.292	506.018.175	(36,53)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	154.055.608	154.055.608	-
Jumlah Penyusutan	1.118.603.544	1.573.689.363	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.118.603.544	1.573.689.363	(29)

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp.(34,901)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.(34,901) dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan ganti rugi	0	0	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/Tuntutan ganti rugi	34.901	0	#DIV/0!
Jumlah	34.901	0	#DIV/0!

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.42,562,942

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2020 dan 2019 Rp.42,562,942 dan Rp.(63,775) terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 31

Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak lain/Pihak Ketiga	42.019.700	0	#DIV/0!
Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL	370.042	1.225	30107,51
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	263.200	355.000	(25,86)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	42.652.942	356.225	11.874

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pos Luar Biasa **D.13 Pos Luar Biasa**

Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.54,322,870,549

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.54,322,870,549 dan Rp.59,573,395,770

Defisit LO
Rp.(18,408,061,139)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.(18,408,061,139) dan Rp.(13,531,742,040) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp.0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset Tetap
Rp.(574,648,200)

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang

berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.(574,648,200) dan Rp.(1,849,029,372) Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air.

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp.251,322,19
9*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.251,322,199 dan Rp.1,246,286,628 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2020

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	-
Gedung dan Bangunan	-
Jaringan	-
Jumlah	-

*Koreksi Lain-
Lain
Rp.10,000*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.10,000.dan Rp.0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	10.000
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	10.000

*Transaksi
Antar Entitas*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang

Rp.12,134,014,29

4

berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.12,134,014,294 dan Rp.11,376,532,819 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	12.096.322.096
Diterima Dari Entitas Lain	(178.220.269)
Transfer Keluar	(130.921.000)
Transfer Masuk	346.833.467
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	12.134.014.294

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2020, DDEL sebesar Rp(178,220,269) sedangkan DKEL sebesar Rp.12,096,322,096

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.0 terdiri dari:

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas,

barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.0-. dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang tahun 2019.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	-	Uang	Rp -
2	-	Barang	Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir
Rp.47,725,507,703

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.47,725,507,703 dan Rp.54,322,870,549

F. PENGUNGKAPAN - PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

-Tidak Ada-

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Pembelian Alat Kesehatan (COVID19) – Thermorgan Rp.1.105.000
- Transfer Masuk Peralatan dan Mesin dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI ;
 1. Kamera Conference Rp.25,334,000
 2. Digital Thermometer Rp.179,500,000
- Transfer Keluar Persediaan untuk Penanganan Covid-19 Ke UPT ;
 1. Kantor Imigrasi Klas I TPI Ambon Rp.78,096,000
 - Sabun Cuci Tangan Botol 171

- Masker 69
- Sarung Tangan 69
- Face Shield 171
- Hand Sanitizer 171
- Multivitamin 57

2. Kantor Imigrasi Klas II TPI Tual Rp.52,852,000

- Sabun Cuci Tangan Botol 45
- Masker 90
- Sarung Tangan 9
- Face Shield 90
- Hand Sanitizer 45
- Multivitamin 30
- Cairan Disinfektan 1,000

Lampiran I: Rincian Akumulasi Penyusutan

Kantor Wilayah Maluku
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020

- TERLAMPIR-

Lampiran II: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

KANTOR WILAYAH MALUKU
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA
PER 30 Juni 2017

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	-	Uang	DN	Rp -		Rp -	-
		Barang	DN	Rp -	Rp -		
2	-	Uang	LN	Rp -	Rp -		
3	-	Barang	DN	Rp -		Rp -	-
Jumlah				Rp -	Rp -	Rp -	-